

DAMPAK KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

**Ni Nyoman Suryaningsih¹
Made Suyana Utama²
I.N. Mahaendra Yasa³**

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (UNUD), Bali, Indonesia
email: suryaningsih_110188@yahoo.co.id

ABSTRAK

Otonomi daerah mendorong kabupaten/kota di Provinsi Bali memaksimalkan potensi daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kinerja pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali, selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis faktor, analisis jalur dan uji sobel. Berdasarkan analisis data, disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh nyata terhadap kinerja pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2001-2011. Berdasarkan analisis jalur dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh nyata terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2001-2011.

Kata kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Pembangunan Daerah, Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the impact of the financial performance of the performance of regional development, analyze the impact of the financial performance of the public welfare, to analyze the performance impact of regional development for the welfare of society, and analyze the impact of the financial performance of the well-being of the region through regional development performance. Sources of data in this study is secondary data obtained from the Central Statistics Agency of Bali Province and Department of Labor Transmigration and Population Bali Province. The analysis technique used is factor analysis, path analysis and Sobel test. From the results of this study concluded that from 2001 to 2011, the financial performance of a real and positive effect on the performance of regional development and public welfare district / city in the province of Bali. It also turns out that the results obtained by the performance of regional development and a real positive effect on the welfare of the community district / city in the province of Bali. Based on the obtained path analysis results that positively impact the financial performance and the real performance of the public welfare through the development of the district / city in the province of Bali.

Keywords: Regional Financial Performance, Regional Development Performance, Social Welfare

PENDAHULUAN

Gerakan reformasi menurunkan Pemerintahan Orde Baru menuntut perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang bersumber dari aspirasi rakyat (Nehen, 2012). Era reformasi berdampak terhadap perubahan paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan yang direalisasikan berdasarkan kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 (Mulyadi, 2013). Pemberlakuan otonomi menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah daerah yaitu berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata, dan berkesinambungan (Wong, 2004).

Keuangan daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah merupakan alokasi sumber daya daerah dan media yang digunakan untuk mengevaluasi prestasi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah untuk kepentingan publik dan dipertanggungjawabkan sehingga mendorong pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat (Askam, 2008). Dengan demikian perlu dilakukan analisis kinerja keuangan dengan membandingkan kinerja yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan daerah (Bratakusumah, 2001).

Salah satu provinsi di Indonesia yang menerima otonomi penuh semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada tahun 2001 adalah Provinsi Bali. Rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam pengukuran kinerja

keuangan yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai sendiri kegiatan pemerintah, dan pelayanan terhadap masyarakat di daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2011

Kab/kota	Rasio Kemandirian (%)											Rata-rata
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Jembrana	3,80	6,58	5,59	4,70	4,47	3,69	4,30	4,67	5,00	7,03	7,27	5,19
Tabanan	10,63	11,98	11,20	13,60	12,35	9,53	8,87	13,17	13,72	13,74	15,91	12,24
Badung	57,82	60,21	50,13	57,90	59,62	54,58	52,88	60,61	60,54	68,70	75,98	59,91
Gianyar	16,59	18,83	11,90	16,65	17,75	14,54	13,67	14,86	15,79	19,91	19,71	16,38
Klungkung	7,88	7,52	7,01	6,47	7,67	5,92	6,54	6,86	6,91	7,01	8,10	7,08
Bangli	4,55	4,21	4,51	4,06	3,77	3,17	2,99	2,95	3,99	3,42	4,23	3,81
Karangasem	10,17	9,71	8,01	7,80	8,44	7,08	7,00	7,03	7,68	9,31	15,79	8,91
Buleleng	6,06	5,55	4,90	5,64	6,07	5,67	5,96	7,21	8,30	10,20	10,35	6,90
Denpasar	32,55	27,73	26,01	25,97	28,03	25,18	22,82	25,66	26,20	28,53	36,95	27,78
Rata-rata	16,67	16,92	14,36	15,87	16,46	14,37	13,89	15,89	16,46	18,65	21,59	16,47

Sumber : BPS Provinsi Bali ,2001-2011 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1, dibandingkan kabupaten/kota yang lain, hanya Kabupaten Badung yang memiliki rasio kemandirian rata-rata diatas 50 persen, artinya secara rata-rata proporsi pendapatan asli daerah Kabupaten Badung mencapai 50 persen dari total pendapatan daerahnya. Selain rasio kemandirian daerah, terdapat rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian yang menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah dalam menggunakan dana untuk belanja yang berhubungan erat dengan upaya meningkatkan perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Pada awal tahun 1990-an Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UNDP*) mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dengan menggunakan nilai indeks pembangunan

manusia (Todaro, 2003). Data IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Nilai dan Peringkat IPM Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2011

Kabupaten/ Kota	2009		2010		2011	
	IPM	Ranking	IPM	Ranking	IPM	Ranking
Jembrana	72,45	4	72,69	5	73,18	5
Tabanan	74,26	3	74,57	3	75,24	3
Badung	74,49	2	75,02	2	75,35	2
Gianyar	72,43	5	72,73	4	73,43	4
Klungkung	70,19	8	70,54	8	71,02	8
Bangli	70,21	7	70,71	6	71,42	6
Karangasem	66,06	9	66,42	9	57,07	9
Buleleng	70,26	6	70,69	7	71,07	7
Denpasar	77,56	1	77,94	1	78,31	1
Provinsi Bali	71,52		72,18		72,84	

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2011

Berdasarkan Tabel 2, dapat dijelaskan bahwa pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Bali nilai IPM secara keseluruhan menunjukkan bahwa masih banyak kabupaten di Provinsi Bali dengan nilai indeks pembangunan manusia yang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bali maka ada banyak hal yang semestinya mendapat perhatian lebih dari pemerintah khususnya pemerintah daerah. Penilaian kinerja pemerintah daerah sangat penting sebab dengan penilaian kinerja diharapkan pemerintah daerah akan bekerja semakin baik, transparan dan akuntabel (Sudrajat, 2011). Berdasarkan uraian di atas maka penelitian berfokus pada “Dampak Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten /Kota di Provinsi Bali”

KAJIAN PUSTAKA

Kesejahteraan masyarakat

Tiga kategori yang merupakan target pencapaian kesejahteraan yakni tentang sejauh mana permasalahan sosial yang dapat diatasi, sejauh mana kebutuhan dapat

terpenuhi, dan sejauh mana kesempatan untuk memperoleh peningkatan taraf hidup, (Midgley, 2005). Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, program pembangunan PBB (UNDP) melalui terbitan serialnya sejak awal tahun 1990-an mengukur kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dengan menggunakan tingkat pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan usia harapan hidup yang dikonstruksi menjadi Indeks Pembangunan Manusia. Selanjutnya alat ukur ini diperluas kegunaannya pada tingkat yang lebih rendah yaitu pada level kabupaten/kota (Gregorius, 2011).

Kinerja pembangunan daerah

Pembangunan daerah merupakan upaya dalam meningkatkan potensi pemerintahan daerah agar terwujud kemampuan yang profesional dalam pelayanan terhadap masyarakat, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat (Susi, 2010). Tingkat ketimpangan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan merupakan ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan (Todaro, 2003). Menurut Riadi (2010), yang merupakan indikator pembangunan adalah indikator ekonomi makro, pemerataan, kesempatan kerja, dan indikator kemiskinan.

Kinerja keuangan daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk membiayai jalannya sistem pemerintahan, pembangunan daerahnya, pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986). Menurut Halim (2007) rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio

efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian belanja merupakan rasio keuangan yang dapat mengukur akuntabilitas pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya

Penelitian oleh Sasana (2009) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap memiliki pengaruh positif dan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan kesenjangan ekonomi antar daerah memiliki pengaruh negatif dan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh Hyun (2013) menyelidiki dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan data panel 1990-2003, menyatakan bahwa antara desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Korea. Penelitian oleh Utama (2009), meneliti mengenai kinerja keuangan daerah dan dampaknya terhadap kinerja pembangunan daerah di daerah Bali Selatan Tahun 2001-2007. Dari analisis diketahui bahwa kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten /kota di daerah Bali Selatan tahun 2001-2007.

Hipotesis penelitian

- 1) Kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan nyata terhadap kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 2) Kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 3) Kinerja pembangunan daerah berpengaruh positif dan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

- 4) Kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Bali yang merupakan daerah otonomi yang memiliki perbedaan penerimaan daerah dan nilai IPM antar kabupaten /kota yang besar, masih banyak IPM kabupaten/kota berada di bawah rata-rata Provinsi yang semestinya mendapat perhatian lebih dari pemerintah khususnya Pemerintah Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali. Penelitian menggunakan data panel yaitu kombinasi data *time series* dengan data *cross section* selama tahun 2001-2011. Penelitian dianalisis dengan teknik analisis faktor, analisis jalur, dan Uji Sobel. Analisis faktor bertujuan untuk mendapatkan skor dari variabel laten yang terbentuk berdasarkan beberapa variabel terukur (Hair, *et al*, 1998). Analisis jalur digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh langsung antar variabel, pengaruh total dan pengaruh tidak langsung (Kerllinger, 2002), sedangkan untuk menguji adanya pengaruh tidak langsung variabel independen ke variabel dependen melalui variabel intervening dilakukan uji sobel. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, pengaruh kinerja keuangan terhadap kinerja pembangunan, kinerja pembangunan terhadap kesejahteraan, dan pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan melalui kinerja pembangunan daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis kinerja keuangan daerah

Dalam penelitian ini kinerja keuangan daerah diturunkan dari teori Mahmudi (2007), Halim (2007), Mahsun (2006), dan studi empiris dari Utama (2009), Gregorius (2011), bahwa kinerja keuangan daerah dapat dianalisis dengan menganalisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, dan upaya pemungutan PAD. Hasil dari analisis faktor diperoleh nilai varian kumulatif sebesar 75,373 persen yang berarti bahwa 75,373 persen konstruk kinerja keuangan daerah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Hasil analisis faktor berupa Indeks kinerja keuangan daerah ditampilkan pada Tabel 3

Tabel 3 Indeks Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2001-2011

Kab/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
Jembrana	1,91	2,18	1,52	1,43	1,02	1,34	1,42	1,53	1,59	1,57	1,67	1,56
Tabanan	1,00	1,76	1,69	1,88	1,77	1,63	1,65	2,35	1,96	2,06	3,18	1,90
Badung	3,85	3,78	3,58	4,27	4,09	3,72	4,33	5,19	4,78	5,02	6,61	4,48
Gianyar	1,54	1,38	1,51	1,76	1,59	1,90	1,90	2,20	2,21	2,33	2,56	1,90
Klungkung	1,48	1,84	1,73	1,61	1,71	1,68	1,77	1,80	1,60	1,57	1,61	1,67
Bangli	1,45	1,56	1,50	1,46	1,54	1,49	1,45	1,49	1,56	1,39	1,35	1,48
Karangasem	1,48	1,55	1,72	1,79	1,93	1,70	1,74	1,98	1,94	1,70	3,60	1,92
Buleleng	1,32	1,79	1,19	1,08	1,54	1,46	1,49	1,73	1,74	1,61	1,74	1,52
Denpasar	1,69	2,20	2,25	2,30	2,76	2,24	2,37	2,73	2,86	2,84	3,49	2,52
Rata-rata	1,75	2,01	1,85	1,95	1,99	1,91	2,01	2,33	2,25	2,23	2,87	2,11

Sumber : Hasil analisis faktor kinerja keuangan daerah,2001-2011 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3 daerah Kabupaten Badung memiliki kinerja keuangan daerah yang paling baik kemudian di posisi kedua adalah Kota Denpasar. Secara rata-rata indeks kinerja keuangan daerah mengalami peningkatan di kabupaten/kota Provinsi Bali dari tahun 2001 sampai dengan 2011.

Analisis kinerja pembangunan daerah

Dalam penelitian ini kinerja pembangunan daerah diturunkan dari teori Todaro (2003), Arsyad (2005), serta penelitian empiris Utama (2009), Riadi (2010), yang menyatakan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi, *gini ratio*, dan konsumsi per kapita membentuk indeks komposit kinerja pembangunan daerah.

Hasil dari analisis faktor diperoleh varian kumulatif (CV) sebesar 74,040 persen yang memiliki arti bahwa sebesar 74,040 persen konstruk kinerja pembangunan daerah dapat dijelaskan oleh ketiga indikator tersebut. Hasil analisis faktor berupa Indeks kinerja pembangunan daerah ditampilkan pada Tabel 4

Tabel 4 Indeks Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2001-2011

Kab/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
Jembrana	1,73	1,62	1,73	2,13	2,66	2,28	2,65	3,10	2,80	2,89	4,81	2,58
Tabanan	1,25	2,20	2,10	2,00	2,79	2,91	3,05	2,91	3,12	3,38	4,77	2,77
Badung	2,44	1,84	1,67	3,06	3,55	3,09	2,88	4,21	3,78	4,55	5,49	3,32
Gianyar	3,05	1,82	1,53	1,84	2,91	3,11	2,93	3,52	3,37	3,52	4,28	2,90
Klungkung	2,03	2,49	1,39	1,93	2,92	2,49	2,65	3,22	3,25	3,35	4,77	2,77
Bangli	1,38	1,34	1,28	1,33	2,04	2,01	1,82	2,17	2,90	2,52	3,39	2,02
Karangasem	1,00	1,26	1,63	1,88	2,44	2,25	2,45	2,33	2,35	2,59	3,30	2,13
Buleleng	1,67	1,82	1,96	2,17	2,92	2,56	2,58	3,10	3,44	3,32	4,28	2,71
Denpasar	2,82	3,07	2,77	3,07	3,51	3,93	4,13	4,59	4,52	4,77	5,72	3,90
Rata-rata	1,93	1,94	1,79	2,16	2,86	2,74	2,79	3,24	3,28	3,43	4,54	2,79

Sumber : Lampiran 11

Berdasarkan Tabel 4 kinerja pembangunan daerah yang paling baik dimiliki oleh Kota Denpasar disusul Kabupaten Badung, dan yang terendah Kabupaten Bangli. Secara rata-rata indeks kinerja pembangunan daerah untuk kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2001 sampai dengan 2011 mengalami peningkatan.

Analisis Kesejahteraan Masyarakat

Dalam penelitian ini kesejahteraan masyarakat diturunkan dari teori yang dikemukakan Todaro (2003), Kuncoro (2006), Midgley (2005) serta penelitian empiris Algifari (2007), Sasana (2009), yang menyatakan bahwa indikator pendapatan per kapita, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah membentuk indeks komposit kesejahteraan masyarakat.

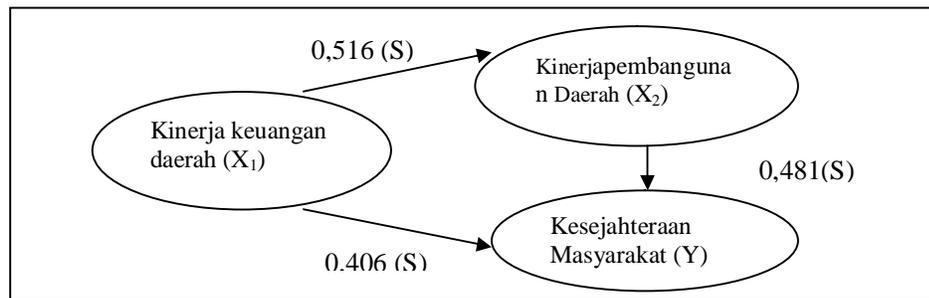
Berdasarkan analisis faktor diperoleh varians kumulatif (CV) sebesar 71,124 persen yang artinya sebesar 71,124 persen konstruk kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh ketiga indikator tersebut. Hasil analisis faktor berupa Indeks kesejahteraan masyarakat ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5 Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2001-2011

Kab/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
Jembrana	2,30	2,66	1,85	2,72	2,88	2,68	3,09	3,18	3,25	3,56	3,57	2,89
Tabanan	2,82	3,05	3,02	3,05	3,20	2,81	3,34	3,46	3,54	3,69	3,86	3,26
Badung	3,99	4,24	3,32	4,36	4,24	4,23	4,38	4,44	4,50	4,95	4,83	4,32
Gianyar	2,69	3,04	2,89	3,04	3,19	2,96	3,36	3,41	3,50	3,69	3,86	3,24
Klungkung	1,93	2,03	1,73	2,39	2,55	2,22	2,69	2,78	2,85	3,07	3,23	2,50
Bangli	1,67	2,24	1,38	2,26	2,41	1,38	2,50	2,54	2,60	2,70	2,77	2,22
Karangasem	1,00	1,06	1,43	1,15	1,33	1,51	1,56	1,59	1,64	1,89	1,94	1,46
Buleleng	1,56	1,56	1,64	1,76	1,93	2,28	2,23	2,33	2,47	2,67	2,77	2,11
Denpasar	4,16	4,26	4,16	4,29	4,33	3,81	4,25	4,35	4,39	4,60	4,66	4,30
Rata-rata	2,46	2,68	2,38	2,78	2,89	2,65	3,05	3,12	3,19	3,42	3,50	2,92

Sumber : Lampiran 11

Perkembangan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2001 sampai dengan 2011 menunjukkan suatu peningkatan. Berdasarkan Tabel 5 juga diketahui bahwa Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Gianyar merupakan daerah yang secara rata-rata yang memiliki indeks kesejahteraan masyarakat paling baik selama tahun 2001-2011. Berdasarkan analisis regresi sederhana, ringkasan koefisien jalur dapat disajikan pada gambar 1 yang menunjukkan adanya pengaruh langsung yang nyata antara variabel.



Gambar 1. Diagram Hasil Penelitian

Keterangan:

(S) = Signifikan

Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa kinerja pembangunan daerah berpengaruh lebih dominan terhadap kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan kinerja keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien jalur masing-masing sebesar 0,481 dan 0,406.

Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali

Analisis penelitian dengan menggunakan analisis jalur menunjukkan hasil bahwa selama periode penelitian, tahun 2001-2011, kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali berpengaruh positif dan nyata terhadap kinerja

pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Di sisi lain, hasil analisis ini memberi tanda bahwa pembangunan daerah kabupaten /kota di Provinsi Bali sensitif terhadap kebijakan pemerintah khususnya kebijakan fiskal.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Halim (2007) yang menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dengan rasio keuangan merupakan kemampuan pemerintah daerah sebagai modal membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini sejalan dengan studi empiris Atsushi (2005) dalam studi empirisnya membahas hubungan desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan positif yang nyata terhadap pertumbuhan produk domestik bruto per kapita.

Dalam penelitian ini rasio kemandirian daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali mempunyai kemampuan menjelaskan yang paling besar terhadap konstruk kinerja keuangan daerah, hal ini berarti bahwa upaya peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2001-2011 menunjukkan adanya peningkatan. Berkaitan dengan hal tersebut, ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan yang tercermin dari rasio-rasio keuangan daerah memiliki peranan penting dalam proses pembangunan daerah, semakin baik kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali maka akan berpengaruh positif terhadap kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2001 sampai 2011. Ini berarti semakin meningkatnya kinerja keuangan daerah yang membaik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil penelitian ini yang menjadi indikator pembentuk kinerja keuangan daerah adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, dan upaya pemungutan PAD.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Minassian (1997) dalam Blanchard (2000) menyatakan, peran alokasi dan distribusi atas sumber-sumber ekonomi merupakan implementasi dari keputusan-keputusan publik pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Indeks kesejahteraan masyarakat pada tahun 2001 sebesar 2,46 meningkat menjadi 3,50 pada tahun 2011. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001 sampai dengan 2011 didukung dengan peningkatan pendapatan per kapita, angka harapan hidup dan pendidikan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan studi empiris Sri Kusraeni dan Sultan Suhab (2009) yang menyatakan bahwa kebijaksanaan mengelola pendapatan daerah berpengaruh positif secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil studi empiris yang dilakukan oleh Utama (2009) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif dan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh kinerja pembangunan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001-2011 berpengaruh positif dan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Selama periode 2001-2011 indeks kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali menunjukkan adanya peningkatan. Indeks kesejahteraan masyarakat sebesar 2,46 pada tahun 2001 meningkat menjadi 3,50 pada tahun 2011. Indeks kinerja pembangunan daerah sebesar 1,93 pada tahun 2001, menjadi 4,54 pada tahun 2011. Peningkatan kinerja pembangunan daerah kabupaten kota di Provinsi Bali tahun 2001-2011 tercermin dari indikator kinerja pembangunan daerah yaitu *gini ratio*, konsumsi per kapita, dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Sasana (2009), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh nyata dan memiliki hubungan yang positif dengan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumsi per kapita masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan *gini ratio* yang merupakan indikator kinerja pembangunan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja pembangunan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001-2011. Pengaruh

kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja pembangunan daerah dapat dijelaskan, bahwa semakin meningkatnya kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali maka dapat melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal.

Pengaruh langsung kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan sebesar 0,406, sedangkan pengaruh tidak langsung kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja pembangunan daerah sebesar $(0,516 \times 0,481) = 0,248$. Ini berarti pengaruh tidak langsung kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja keuangan daerah hanya 0,2 kali pengaruh langsung kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengujian pengaruh mediasi yang dilakukan dengan menggunakan uji sobel menyatakan bahwa model pengaruh tidak langsung dari variabel kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja pembangunan daerah dapat diterima dengan demikian hipotesis 4 diterima yang artinya kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan secara terinci, maka diperoleh kesimpulan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan nyata terhadap kinerja pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2001-2011. Kesuksesan pemerintah daerah

dalam mengelola keuangan daerah berimplikasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, konsumsi per kapita, dan menurunnya angka *gini ratio*. Hal tersebut berdampak terhadap kondisi kesehatan dan pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat sehingga semakin sejahtera.

Saran

Dari hasil penelitian kemandirian daerah rata-rata mengalami peningkatan namun kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Tentunya pemerintah harus cepat tanggap untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah dan menghitung potensi pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dapat melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang bersifat komprehensif dan senantiasa berpihak pada masyarakat.

REFERENSI

- Arsyad lincolin. 2005. *Pengantar perencanaan pembangunan Ekonomi daerah* Edisi kedua ,Yogyakarta bpfe.
- Atsushi Iimi.2005. Decentralization and economic growth revisited: an empirical note.*JBIC Institute, and International Monetary Fund*, 700 19th Street NW, Washington, DC 20431, USA *Journal of Urban Economics* 01/2005;DOI:10.1016/j.jue.2004.12.007Source:RePEChhttp://www.researchgate.net/publication/222524894_Decentralization_and_economic_growth_revisited_an_empirical_note
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.2000-2012, *Bali Dalam Angka*.Kantor Statistik Provinsi Bali.
- Blanchard, O dan A.Shleifer.2000. Fiscal Federalism with and without Political Cenralization:*China Versus Russia NBER Working Paper #7616*.

- Brata, Kusumah,D.2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta :PT Gramedia.
- Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali .2000-2012.Profil Kenenagakerjaan Daerah Tahun 2001-2012.Provinsi Bali.
- Gregorius.2011. “Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata-Provinsi NTT. “(*tesis*).Denpasar: Universitas Udayana (tidak dipublikasikan).
- Halim, Abdul .2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hair ,JF. 1998.*Multivariate Data Analysis.Fourth Edition.New York* : Maemillan Publishing Company.
- Hyun-A Kim. 2013. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Korea.Korea Institute of Public Finance 79-6 Garak-Dong, Songpa-Gu, Seoul138774,KoreaEmail:hyuna@kipf.re.kr.<https://faculty.washington.edu/karyiu/confer/GJ06/papers/kim.pdf>.
- Kerlinger,Alfred N. 2006. *Asas-Asas Penelitian Behavioral (Terjemahan)*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Kuncoro,Mudrajad.2006. *Ekonomika Pembangunan:Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi 4. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta.
- Midgley, James (2005), *Pembangunan Sosial; Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*, Deperta Depag RI, Jakarta.
- Mulyadi.2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Suatu Studi di Kabupaten Kepulauan Sula). *Governance Jurnal Ilmu Jurusan Ilmu Pemerintah FISIPUnsratVol.5No.1(2013),Manado*.<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/download/1489/1187>.
- Nehen, Ketut .2012. *Perekonomian Indonesia* . Udayana University Press. Bali.

- Riadi, Slamet .2010. Kinerja dan Indikator Pembangunan.Tersedia di:<http://kuaterentang.blogspot.com/2010/03/konsepdanindikatorpembangunan.html>.
- Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Ekonomi Pembangunan*. Vol. 10, No.1, Juni 2009:103 – 124.
- Sri Kusraeni, Sultan Suhab. 2009. Kebijakan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*. Vol 5 No 3.
- Supriady, Dedi. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Susi.2010. Analisis Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *Sosial Ekonomi Pembangunan*. 155 Available from:URL: <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JSEP/article/view/527/520>.
- Syamsi, Ibnu.1986.*Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional* .CV. Rajawali, Jakarta.
- Utama,Suyana.2009.Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kinerja Pembangunan Daerah Bali Selatan Tahun 2001-2007. *Laporan Penelitian Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Udayana*.
- Todaro,Michael.2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, edisi kedelapan.Erlangga. Jakarta
- Wong, John D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. *Journal of Public Budgeting., Accounting and Financial Management*. Fall. 16.3. Hal : 413 – 423.